

**KOMPETENSI APARATUR PERANGKAT DESA DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENCEGAHAN  
FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN  
WHISTLEBLOWING SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Penelitian Tesis

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Akuntansi



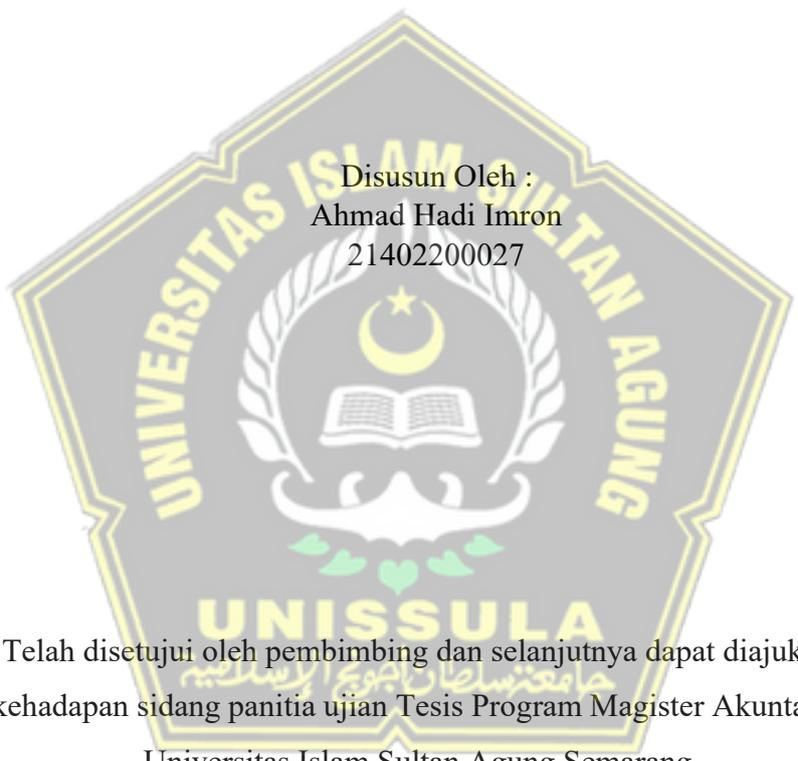
Disusun Oleh :  
Ahmad Hadi Imron  
21402200027

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
TAHUN 2024**

TESIS

**KOMPETENSI APARATUR PERANGKAT DESA DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENCEGAHAN  
FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN  
WHISTLEBLOWING SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun Oleh :  
Ahmad Hadi Imron  
21402200027



Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan  
kehadapan sidang panitia ujian Tesis Program Magister Akuntansi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Agustus 2024

Pembimbing,

Dr. Sri Anik, SE, M.Si  
NIP. ....

**KOMPETENSI APARATUR PERANGKAT DESA DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENCEGAHAN  
FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN  
WHISTLEBLOWING SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun Oleh :  
Ahmad Hadi Imron  
21402200027

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 2 September 2024

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Dr. Sri Anik, SE, M.Si

Penguji 1

Penguji 2

Dr.H.M.Ja'far Shodiq,SE,S.Si, M.Si,  
Ak, CA, CSRS, CSRA, ACP

Dr. LuluK M. Ifada,SE,  
M.Si,Ak,CA,CSRA,CSRS

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu  
persyaratan Untuk memperoleh Gelar Magister  
Akuntansi Tanggal 2 September 2024

Dr.H.M.Ja'far Shodiq,SE.,Ssi, M.Si,Ak,CA,CSRS,CSRA, ACP

Ketua Program Studi Magister Akuntansi  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Hadi Imron

NIM : 21402200027

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang saya buat dan serahkan yang berjudul “ **Kompetensi Aparatur Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi**” merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan dan ringkasan – ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa penelitian ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan atau gelar dan ijazah yang diberikan batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan

Ahmad Hadi Imron

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan tesis dengan judul Kompetensi Aparatur Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi. Tesis ini di susun untuk mencapai gelar Magister Akuntansi. Penulis menyadari pula bahwa selama pembuatan tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Magister Akuntansi.
2. Bapak Dr.H.M.Ja'far Shodiq,SE.,Ssi, M.Si,Ak,CA,CSRS,CSRA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi dan Bapak Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi, beliau berdua memberikan motivasi dukungan dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Sri Anik, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bijak telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis.
4. Dosen penguji dan dosen-dosen Magister Akuntansi yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Pustakawan dan staf administrasi yang telah memberikan layanan perpustakaan dan layanan perkuliahan selama menuntut ilmu di

Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selama penyusunan tesis.

6. Bapak Yulius Bagus Triyanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali yang telah memberikan ijin penulis dalam melakukan penelitian.
7. Istri dan anak saya tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, perhatian dan pengorbanan secara moral dan material dalam proses penyusunan tesis ini.
8. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Teman seperjuangan mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih telah memberi motivasi dan berproses bersama sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu proses dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, Agustus 2024

Penulis,

Ahmad Hadi Imron

## DAFTAR ISI

Usulan Penelitian Tesis.....	i
TESIS.....	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Grand Theori.....	13
2.2. Kompetensi Aparatur Perangkat Desa.....	15
2.2.1. Definisi Kompetensi Aparatur Perangkat Desa.....	15
2.2.2. Dimensi dan Indikator Kompetensi Aparatur Perangkat Desa.....	16
2.3. Sistem Pengendalian Internal .....	17
2.3.1. Definisi Pengendalian Internal .....	17
2.3.2. Dimensi Dan Indikator Pengendalian Internal .....	18
2.1.3. Whistleblowing ( <i>Whistleblowing System</i> ) .....	19
2.1.3.1. Definisi Whistleblowing ( <i>Whistleblowing System</i> ) .....	19
2.1.3.2. Dimensi dan Indikator Whistleblowing ( <i>Whistleblowing System</i> ) .....	20
2.4. <i>Fraud</i> .....	20
2.4.1. Definisi <i>Fraud</i> .....	20
2.4.2. Dimensi dan Indikator Pencegahan <i>Fraud</i> .....	21
2.5. Penelitian Terdahulu.....	22
2.6. Pengembangan Hipotesis.....	28
2.6.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa .....	29

2.6.2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa .....	30
2.6.3.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Whistleblowing .....	32
2.6.4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Whistleblowing .....	33
2.7.	Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	35
3.2.	Populasi Dan Sampel .....	36
3.3.	Sumber Dan Jenis Data .....	37
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	37
3.5.	Definisi Operasional Variabel .....	38
3.7.	Metode Analisis Data .....	44
3.7.1.	Statistik Deskriptif .....	45
3.7.2.	Uji Validitas .....	45
3.7.3.	Uji Realibilitas Data .....	45
3.7.4.	Uji Asumsi Klasik .....	46
3.7.4.1.	Uji Normalis Data .....	46
3.7.4.2.	Uji Heteroskedastisitas .....	46
3.7.4.3.	Uji Multikolinieritas .....	47
3.8.	Analisis Regresi Linier Berganda dari MRA .....	47
3.9.	Uji Goodness Of Fit .....	49
3.9.1.	Uji F .....	49
3.9.2.	Koefisien Determinasi (R Kuadrat) .....	50
3.9.3.	Uji Hipotesis dengan uji t .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
4.1.	Deskripsi Sampel .....	52
4.2.	Analisis dan Pembahasan .....	53
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	53
4.2.1.1.	Karakteristik Deskriptif Responden .....	53
4.2.1.2.	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	54
1)	Kompetensi Aparatut Perangkat Desa .....	55
2)	Sistem Pengendalian Internal .....	57
3)	Whistleblowing .....	58

4) Pencegahan fraud.....	59
4.3. Uji Validitas.....	60
4.4. Uji Realibilitas Data.....	61
4.5. Uji Asumsi Publik.....	62
4.5.1. Uji Normalis Data.....	62
4.5.2. Uji Heteroskedastisitas .....	63
4.5.3. Uji Multikolinearitas.....	64
4.6. Analisis Regresi Linier Berganda dari MRA.....	65
4.7. Uji Goodness Of Fit.....	66
4.7.1. Uji F .....	66
4.7.2. Koefisien Determinasi (R Kuadrat).....	67
4.7.3. Uji t .....	67
4.8. Pembahasan .....	69
4.8.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa .....	69
4.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa .....	71
4.8.3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi <i>Whistleblowing</i> .....	73
4.8.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi <i>Whistleblowing</i> .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan.....	75
5.1.1. Masalah Penelitian.....	75
5.2. Implikasi Teoritis.....	76
5.3. Implikasi Kebijakan.....	77
5.4. Keterbatasan Penelitian .....	77
5.5. Agenda Penelitian Mendatang.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
Lampiran 1. Kuesioner .....	81
Lampiran 2. Tabulasi data .....	83
Lampiran 3. Pengolahan data SPSS.....	92

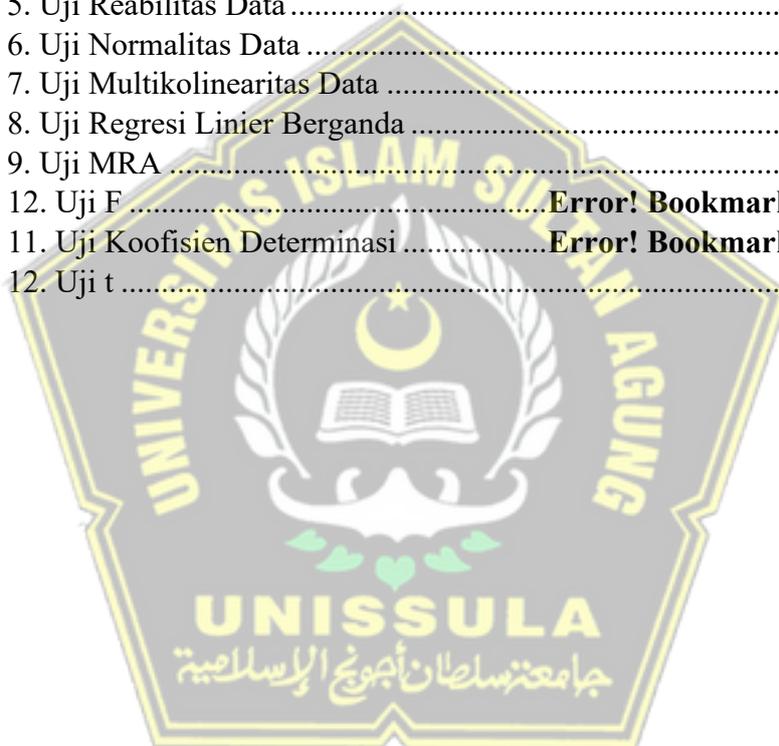
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran ..... 34



## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3 1 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 4 1 Deskripsi sampel .....	52
Tabel 4 2 Karakteristik Responden .....	53
Tabel 4 3 Deskriptif Variabel.....	54
Tabel 4 4. Uji validitas data .....	60
Tabel 4 5. Uji Reabilitas Data .....	62
Tabel 4 6. Uji Normalitas Data .....	62
Tabel 4 7. Uji Multikolinearitas Data .....	64
Tabel 4 8. Uji Regresi Linier Berganda .....	63
Tabel 4 9. Uji MRA .....	64
Tabel 4 12. Uji F .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4 11. Uji Koefisien Determinasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4 12. Uji t .....	68



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa, serta untuk menguji variabel moderasi *whistleblowing* terhadap pengaruh sistem aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

Sampel pada penelitian ini sejumlah 125 responden, berasal dari perangkat desa di kab. Boyolali. Kategori desa yang dijadikan responden adalah desa dengan nilai dana desa diatas 1 milyar dan selama 2019-2023, pemerintah tidak pernah melakukan penyelewengan dana desa selama tahun tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, dengan model pengambilan data menggunakan metode purposive sampling, diambil sebanyak seratus dua puluh lima responden untuk pengolahan data menggunakan SPSS versi 26.

Untuk mengetahui hubungan antara kompetensi aparatur perangkat desa, sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing* sebagai variabel pemoderasi, penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, variabel *whistleblowing* terbukti memoderasi hubungan pengaruh antara kompetensi aparatur perangkat desa terhadap pencegahan fraud namun tidak terbukti memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

Keyword : **Kompetensi Aparatur ; Pengendalian Intern ;Whistleblowing Pencegahan Fraud**

## ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the effect of the competence of the village apparatus and internal control system on the prevention of village fund management fraud, as well as to test the moderation variable of whistleblowing on the effect of the village apparatus and internal control system on the prevention of fraud.

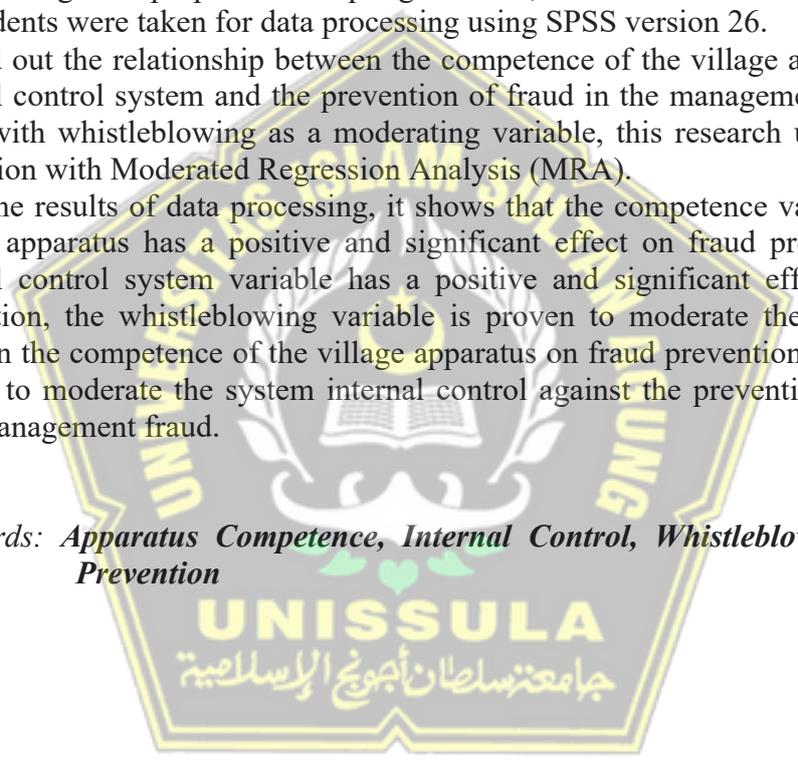
The sample in this research is a total of 125 respondents, from the village apparatus in the district. Boyolali. The category of villages that are respondents are villages with a value of village funds above 1 billion and during 2019-2023, the government has never misappropriated village funds during that year.

This research is a quantitative research using primary data, with a data collection model using the purposive sampling method, one hundred and twenty five respondents were taken for data processing using SPSS version 26.

To find out the relationship between the competence of the village apparatus, the internal control system and the prevention of fraud in the management of village funds with whistleblowing as a moderating variable, this research uses multiple regression with Moderated Regression Analysis (MRA).

From the results of data processing, it shows that the competence variable of the village apparatus has a positive and significant effect on fraud prevention, the internal control system variable has a positive and significant effect on fraud prevention, the whistleblowing variable is proven to moderate the relationship between the competence of the village apparatus on fraud prevention, but it is not proven to moderate the system internal control against the prevention of village fund management fraud.

**Keywords:** *Apparatus Competence, Internal Control, Whistleblowing, Fraud Prevention*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Dana desa, sebagai amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kucuran dana milyaran rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa yang juga merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Penyaluran dana tersebut menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan desa yang lebih maju. Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk mendukung kegiatan dan mewujudkan program pembangunan desa. Anggaran dana desa mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

Pada awalnya pemerintah telah mengalokasikan dana desa yaitu sebesar Rp 20,7 triliun (2015), Rp 47 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), Rp 70 triliun (2019), 72 triliun (2020 & 2021), 68 triliun (2022) dan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Anggaran dana desa tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan fasilitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya alokasi dana desa diharapkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengalokasian anggaran dana desa menjadi hak kewenangan pemerintah setempat sesuai dengan prinsip keadilan dan asas rekognisi subsidiaritas serta mengedepankan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sesuai dengan target pembangunan perdesaan RPJMN 2015-2019, penggunaan dana desa digunakan untuk mewujudkan kemandirian desa serta

mendukung pengentasan desa tertinggal. Namun besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya fraud. Pencegahan fraud dilakukan pemerintah salah satunya dengan cara membentuk peraturan perundangundangan nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, sehingga menjamin keamanan saksi dalam melaporkan tindakan fraud. Selain itu dalam rangka mencegah fraud dalam pengelolaan dana desa, pemerintah terus melakukan perbaikan dengan mengoptimalkan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Kebijakan pencegahan fraud yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan fraud. Fraud merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja baik individu maupun kelompok yang mempunyai wewenang tanggungjawab tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi (IAPI, 2013). Meskipun sejak tahun 2016 BPK telah melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana desa, tindakan fraud masih sering terjadi hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi di pemerintah desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa (ICW, 2021). Korupsi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2020 tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 111 miliar (<https://nasional.kompas.com>).

Banyaknya berita terkait kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa di surat kabar, televisi maupun media sosial memberikan kita kesadaran bahwa perlu adanya upaya untuk membenahi

ketidakberesan yang terjadi. Apalagi diberbagai artikel diketahui bahwa terjadinya indikasi penyalahgunaan justru dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa. Bahkan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan anggaran dana desa ini hampir berbanding lurus dengan berlakunya undang-undang baru anti tindakan kecurangan. Namun kenyataannya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi tindakan kecurangan tidak berjalan dengan lancar dan hanya bersifat formalitas.

Fenomena pelanggaran moral dan etika yang sering kita amati dalam pemerintahan desa dapat berupa proses pembuatan kebijakan publik dalam pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak di dasarkan atas kenyataan desain organisasi pelayanan publik mengenai pengaturan struktur, formalitas, disperse otoritas terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamufase mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, informasi yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsive, tidak akuntabel, dan tidak adil sehingga tidak dapat memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya pelayanan publik dilakukan secara beretika agar tidak adanya kekecewaan dalam suatu masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Manossoh (2016) bahwa pejabat yang memiliki perilaku yang baik akan membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya.

Terjadinya fraud juga dapat dikendalikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. *Comitte of Sponsoring Organization of the Treadway Commision* (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu

proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personil dalam organisasi, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum serta efektifitas dan efesiensi operasi. Suatu organisasi membentuk sistem pengendalian internal untuk mengawasi guna mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan pengendalian internal oleh suatu organisasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengendalian.

Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali pun tidak pernah luput dari adanya kasus penyelewengan dana desa. Dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan pun hampir sama yaitu terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menggunakan dana desa namun tidak sesuai dengan spesifikasi dan rincian anggaran belanja (RAB). Misalnya kejadian penyelewengan dana desa di desa Teter Kecamatan Simo, desa kaligotong gladagsari, dan desa tonjong sari kecmatan banyudono di tahun 2023.

Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi berdampak pada pembangunan desa yang tidak sesuai dengan semestinya seperti terbengkalainya pembangunan untuk fasilitas umum dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturn pemerintah desa tersebut menjadikan begitu pentingnya tindakan dan upaya yang harus dilakukan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya fraud dalam organisasi khususnya terkait

dengan pengelolaan dana desa, guna menghindari kerugian negara di masa mendatang.

Sistem Pengendalian Intern yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." (Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).

Penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparat desa terhadap fraud dana desa antara lain dilakukan oleh Islamiyah dkk (2020), Dewi dkk. (2022), Puspita & Ratnadi (2023). Sedangkan penelitian oleh Adhivinna dkk (2022) dan Mufidah & Masnun, (2021) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan penyelewengan dana desa. Penelitian mengenai pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa dilakukan oleh Sari dkk (2019), Kusumastuti dkk (2020), Islamiyah dkk (2020), Mufidah & Masnun (2021), Adhivinna dkk, (2022), Puspita & Ratnadi (2023). Penelitian dengan hasil tidak ada

pengaruh pengendalian internal terhadap fraud dana desa pernah dilakukan oleh Ayem & Kusumasari (2020). Sistem pelaporan dapat memoderasi hubungan antara pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah penelitian yang dilakukan oleh Bayan dkk, (2020). Dari beberapa gambaran penelitian di atas ada riset gap, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut di lokasi yang berbeda dengan tambahan whistleblowing sebagai moderasinya.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan kajian literatur dan dalam rangka upaya pencarian dalam melakukan perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat tinggi, maka diperlukan suatu cara untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa tersebut, selain juga perlu optimalisasi dari partisipasi masyarakat, dan suatu bentuk antisipasi untuk mencegah kasus serupa terjadi Pencegahan fraud adalah upaya yang dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya fraud.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah aspek pengawasan. Pengawasan ini berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang dilakukan suatu instansi dalam meningkatkan kualitas output dan mengurangi terjadinya tindakan fraud (Sri Ayem;2022). Sistem pengendalian internal yang buruk juga menjadi bahan pemicu seseorang untuk

berbuat fraud dan melawan hukum. (Laksmi & Sujana, 2019; Atmadja & Saputra, 2017). Oleh karena itu berbagai macam kecurangan keuangan yang terjadi di organisasi dapat ditangkal menggunakan sistem pengendalian internal yang memadai.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur (Komang adi Kurniawan dkk;2022). Menurut Widyani & Wati (2020) kompetensi aparatur adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipegang oleh setiap aparatur/perangkat dalam memecahkan masalah sehingga mendorong aparatur untuk melakukan sesuatu secara optimal dalam menjalankan tugas mereka di pemerintah desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah whistleblowing (ACFE Indonesia, 2020; PwC, 2020). Whistleblowing adalah pengungkapan informasi tentang tindak kecurangan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak pada kerugian negara atau masyarakat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi (Islamiyah dkk., 2020). Salah satu upaya untuk melakukan whistleblowing yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak didalam organisasi maupun luar organisasi. Sistem ini merupakan tempat atau wadah bagi whistleblower untuk melaporkan tindak kecurangan/fraud.

Dari urain tersebut diatas seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Boyolali merupakan penerima penghargaan sebagai Kabupaten tanpa korupsi tingkat

nasional pada tahun 2022 sehingga sangat menarik untuk mengkaji dan meneliti apakah sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur perangkat desa dan Whistleblowing (*whistleblowing*) mampu mencegah penyelewengan pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Boyolali.

## 1.2. Rumusan Masalah

Masalah merupakan bentuk perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang dibuat seorang peneliti, kemudian pertanyaan tersebut dicarikan jawabannya melalui penelitian, pengolahan data penelitian, eksperimen dan lain sebagainya yang dilakukan secara ilmiah. Rumusan masalah yang dibuat secara jelas yaitu rumusan masalah yang baik. Karena rumusan masalah akan dijadikan sebagai pedoman langkah-langkah selanjutnya dalam pengambilan data.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kompetensi aparatur perangkat desa, sistem pengendalian intern dan whistleblowing terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur perangkat desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa

3. Apakah whistleblowing mampu memediasi kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh kompetensi aparatur perangkat desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh whistleblowing memediasi kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi akademis bagi penulis sendiri, kontribusi praktis bagi pemerintah, kontribusi teoritis bagi penelitian selanjutnya.

1. Kontribusi akademis

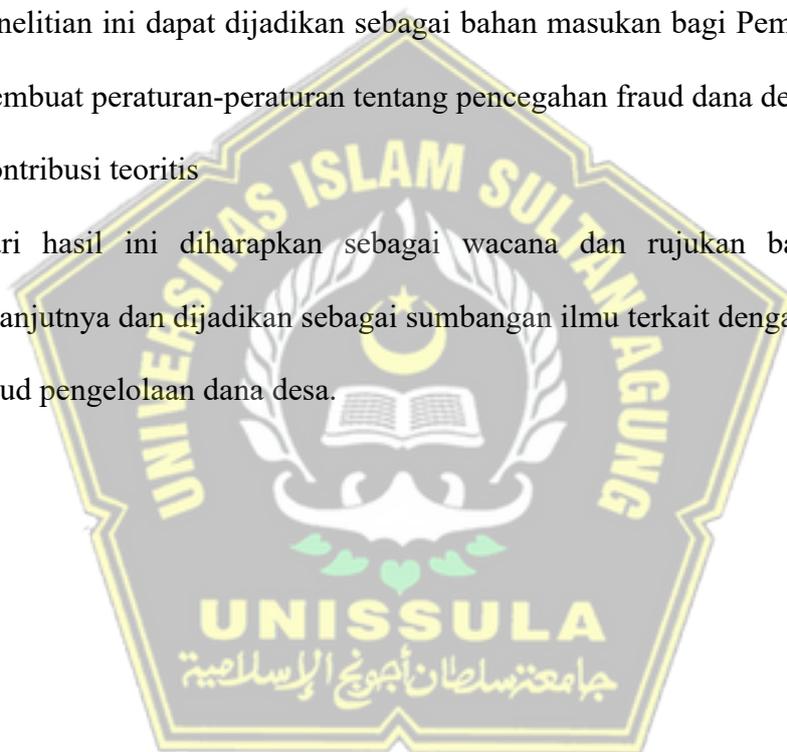
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi penulis dan memperkaya bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kompetensi aparat perangkat desa, sistem pengendalian internal dan whistleblowing, sehingga mampu menjadikan referensi untuk bidang studi serta dapat digunakan untuk pustaka bagi penelitian selanjutnya untuk menambah pengetahuan akademis.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan tentang pencegahan fraud dana desa.

3. Kontribusi teoritis

Dari hasil ini diharapkan sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya dan dijadikan sebagai sumbangan ilmu terkait dengan pencegahan fraud pengelolaan dana desa.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Grand Teori

Dalam sebuah penelitian kajian pustaka merupakan hal yang penting. Kajian pustaka juga disebut sebagai landasan teori. Sebuah penelitian akan diragukan keilmiahannya apabila tidak ada kajian pustaka, karena merupakan landasan kebenaran dari suatu penelitian. Kajian pustaka merupakan tindakan pencermatan, pendalaman dan menelaah pengetahuan. Kajian pustaka memuat uraian mengenai kajian literatur yang menjadi dasar gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah dan dijadikan sebagai pendukung proses pencarian teori. Dalam penelitian ini variabel yang dijadikan sebagai landasan teori yaitu kompetensi aparatur perangkat desa, sistem pengendalian intern, whistleblowing dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

Landasan teori penelitian yang menjelaskan kompetensi aparatur perangkat desa yaitu teori keagenan (*agency theory*). Menurut Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Teori keagenan digunakan sebagai dasar karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah (agen) untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.

Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan

aparatus desa lainnya sebagai agen bagi masyarakat desa (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada agen untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Teori Tindakan Komunikatif (*The Theory of Communicative Action*) digunakan sebagai landasan dasar variabel *fraud* pengelolaan dana desa. Tindakan komunikatif yang dimaksud yaitu tindakan yang mengarahkan setiap tindakan menjadi tindakan yang rasional dan berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti sebagai teori pendukung untuk pengungkapan kecurangan. *Fraud triangle theory* setidaknya menjelaskan ada 3 faktor yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). *Fraud triangle theory* ini kemudian dikembangkan dengan menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini turut berpengaruh signifikan terhadap fraud yaitu kemampuan (*capability*).

*Prosocial behavior* menjadi teori yang mendukung intensi whistleblowing. Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan *prosocial organizational behavior* sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi. Perilaku prososial dapat digunakan untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat melakukan whistleblowing. Near & Miceli (1988) mengemukakan bahwa whistleblower melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya

membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.

Teori dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholifah (2020) digunakan sebagai dasar untuk mendukung dalam penyelesaian masalah penelitian dari variabel kompetensi aparatur desa. Penyelesaian masalah variabel pengendalian intern dan pencegahan *fraud* dalam penelitian menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Made Resmiani (2020). Penyelesaian masalah variabel *whistleblowing system* menggunakan indikator yang digunakan oleh Anandya (2020) dalam penelitian terdahulu sebagai landasan teori.

## **2.2. Kompetensi Aparatur Perangkat Desa**

### **2.2.1. Definisi Kompetensi Aparatur Perangkat Desa**

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kecurangan bisa saja terjadi meskipun orang tersebut memiliki wewenang tinggi di perusahaan tetapi kompetensi yang dimilikinya tidak memenuhi (Adhivinna dkk, 2022). Menurut Suparno (2012) kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau dapat diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki dan kecakapan yang diisyaratkan.

Menurut Laksmi & Sujana (2019) kompetensi SDM adalah kemahiran/keterampilan yang didapati dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan saat melakukan tanggungjawab pekerjaannya. Kompetensi

perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Laksmi & Sujana, 2019).

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan setiap individu, lembaga dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan, untuk mengidentifikasi, dan mencapai tujuan. Kompetensi aparatur desa sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya peluang adanya fraud dana desa (Dewi dkk, 2022). Kompetensi aparatur yaitu keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal.

### **2.2.2. Dimensi dan Indikator Kompetensi Aparatur Perangkat Desa**

Pengukuran variabel kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholifah (2020). Pengukuran variabel menggunakan dimensi dan indikator sebagai berikut :

1. Pengetahuan/pemahaman
  - Aparatur desa harus mengerti tentang peraturan pengelolaan dana desa
2. Keterampilan/kemampuan
  - Aparatur desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa

- Aparatur desa mampu mengelola dana desa dengan baik
- Aparatur desa mampu mengalokasikan dana desa sesuai kebutuhan

### 3. Sikap

- Aparatur desa jujur dalam mengelola dana desa
- Aparatur desa bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa
- Aparatur desa dalam mengelola dana desa berdasarkan prinsip kehati-hatian
- Aparatur desa teliti dalam mengelola dana desa

## 2.3. Sistem Pengendalian Intern

### 2.3.1. Definisi Pengendalian Intern

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Menurut *Committee Of The American Institute Of Accountants (AICPA)* dalam Sanuari (2014) definisi pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, peningkatan efisiensi usaha, dan mendorong ditaati kebijakan manajemen yang di terapkan (Sari dkk, 2019).

Pengendalian Intern adalah suatu rencana organisasi dan metode yang dapat digunakan untuk menjaga atau melindungi asset, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Semua pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif (Mufidah & Masnun, 2021).

### 2.3.2. Dimensi Dan Indikator Pengendalian Internal

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
  - Struktur organisasi berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan
2. Penilaian risiko
  - Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan diberikan untuk meningkatkan kompetensi agar terhindar dari segala bentuk resiko yang mungkin terjadi
3. Kegiatan pengendalian
  - Pemeriksaan dilakukan dengan independen atas kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa
4. Informasi dan komunikasi
  - Informasi yang disajikan dibuat dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dikomunikasikan dengan pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat
5. Pemantauan pengendalian intern
  - Pemantuan maupun pengawasan dilakukan secara periodik agar dapat meminimalisir tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi

### **2.1.3. Whistleblowing (*Whistleblowing System*)**

#### **2.1.3.1. Definisi Whistleblowing (*Whistleblowing System*)**

Whistleblowing system merupakan suatu kegiatan pengungkapan yang pada umumnya dilakukan secara rahasia atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum yang tidak etis dan tidak bermoral sehingga dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi ataupun karyawan kepada pimpinan lembaga/organisasi lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2008).

Salah satu upaya whistleblowing yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun diluar organisasi. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan (Dewi dkk, 2022).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwasanya whistleblowing merupakan pengungkapan yang dilakukan atas aktivitas/sikap yang melanggar atau melawan hukum, sikap yang tidak patut/tidak bermartabat atau sikap lain yang dapat merugikan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran yang terjadi. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia (Islamiyah dkk, 2020).

### 2.1.3.2. Dimensi dan Indikator Whistleblowing (*Whistleblowing System*)

Dimensi Whistleblowing di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan KNKG (2008), *whistleblowing system* terdiri dari 3 aspek, yaitu:

#### 1. Aspek Struktural

- Komitmen aparat desa untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran
- Pemerintah desa berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran
- Struktur organisasi berkomitmen membuat unit pengelolaan *whistleblowing system*
- Sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan *whistleblowing system*

#### 2. Aspek operasional

- Mekanisme dan prosedur kerja *whistleblowing system* mudah

#### 3. Aspek perawatan

- *Whistleblowing system* efektif dan berkelanjutan

## 2.4. *Fraud*

### 2.4.1. Definisi *Fraud*

Kecurangan yaitu suatu tindakan penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain (Ayem & Kusumasari, 2020).

Secara umum, fraud merupakan suatu wujud kebohongan atau tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya wujud pertanggungjawaban. Kata Fraud berasal dari bahasa Inggris. Fraud pada kamus ringkas Oxford berarti perbuatan kriminal seperti penipuan, segala sesuatu yang dipergunakan dalam bentuk apapun akan salah apabila hanya untuk mendapatkan kepuasan dan untung yang bukan hak miliknya. Usaha untuk meminimalisir berlangsungnya kejadian yang mengakibatkan fraud disebut dengan pencegahan fraud (Adhivinna dkk, 2022).

Menurut Tuanakotta (2017:226) definisi fraud adalah penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu. Contohnya penjualan aset negara secara tidak sah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengadaan kickbacks dalam sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah.(Islamiyah dkk, 2020).

#### **2.4.2. Dimensi dan Indikator Pencegahan *Fraud***

Menurut Pusdiklatwas BPKP 2008, dimensi dari pencegahan fraud adalah sebagai berikut :

##### **1. Penetapan kebijakan**

- Struktur organisasi akan memberi sanksi tegas terhadap segala bentuk kecurangan
- Masyarakat selalu dilibatkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa

## 2. Prosedur pencegahan

- Pemerintah desa selalu terbuka dan menerima masukan, saran dan kritikan dari masyarakat mengenai pengawasan program dana desa baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan

## 3. Organisasi

- semua aparatur desa selalu diberi kesempatan dalam mengajukan sebuah kritikan maupun saran saat pemecahan masalah terkait pengelolaan dana desa

## 4. Teknik pengendalian

- Setiap dana desa yang diterima dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun
- Pemerintah desa membuat laporan pelaksanaan program keseluruhan pada akhir periode saat menerima dana desa

### 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan kajian literatur dan dalam rangka upaya pencarian dalam melakukan perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut beberapa penelitian yang punya relevansi dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari dkk (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota)	Independen : Akuntabilitas, Kesesuaian kompensasi, Pengendalian intern  Dependent : Potensi kecurangan	1. Akuntabilitas dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan potensi kecurangan 2. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan potensi kecurangan
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Ayem & Kusumasari (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi (studi pada desa-desa di Kecamatan Ngaglik dan Ngeemplak Yogyakarta)	Independen : Sistem pengendalian internal pemerintah  Dependen : Fraud dana desa  Moderasi : Akuntabilitas	1. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas 2. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap fraud 3. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap fraud dengan mediasi akuntabilitas
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Kusumastuti dkk (2020)	The Effect Of Internal Control Systems, Compliance Of Government Financial	Independen : Sistem pengendalian	1. Sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan

		Reporting, Organization And Whistleblowing Cultural Culture On Village Prevention Prevention Of Village Funds Management With Morality As Moderating Variables (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpicias).	intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi, <i>whistleblowing</i>  Dependen : <i>Fraud</i> dana desa  Moderasi : Moralitas	keuangan, budaya etis organisasi dan whistleblowing berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pencegahan fraud. 2. Moralitas mampu memoderasi dan ketaatan pelaporan keuangan dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud. 3. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian intern dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan fraud
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Bayan dkk (2020)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi. (studi pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai)	Independen : Pengaruh komitmen organisasi, kejelasan anggaran dan efektivitas pengendalian interal akuntabilitas kinerja pemerintah  Dependen : akuntabilitas kinerja pemerintah  Moderasi : System pelaporan	1. Komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 2. Whistleblowing dapat memoderasi hubungan antara pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Kusumastuti dkk (2020)	The Effect Of Internal Control Systems, Compliance Of Government Financial Reporting, Organization And Whistleblowing Cultural Culture On Village Prevention Prevention Of Village Funds Management With Morality As Moderating Variables (pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)	<p>Independen :</p> <p>Sistem pengendalian internal, budaya etis organisasi, ketaatan pelaporan keuangan</p> <p>Dependen :</p> <p>akuntabilitas kinerja pemerintah</p> <p>Moderasi :</p> <p>Moralitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan whistleblowing berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pencegahan fraud</li> <li>2. Moralitas mampu memoderasi dan ketaatan pelaporan keuangan dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud.</li> <li>3. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian intern dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan fraud</li> </ol>
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Resmiani (2020)	Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	<p>Independen :</p> <p>budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, efektifitas pengendalian internal</p> <p>Dependen : :</p> <p>pencegahan kecurangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa</li> <li>2. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa</li> <li>3. efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif</li> </ol>

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Kholifah (2020)	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Sumber Dan Kecamatan Rembang)	<p>Independen :</p> <p>Kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi, transparansi</p> <p>Dependen :</p> <p>Akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Mediasi :</p> <p>Kinerja</p>	<p>signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kompetensi perangkat desa dan kinerja pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</li> <li>komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh dan transparansi berpengaruh negatif.</li> <li>Kompetensi perangkat desa dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa,</li> <li>transparansi berpengaruh negatif. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kinerja pemerintah desa.</li> <li>Komitmen pemerintah desa</li> </ol>

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				tidak berpengaruh dan transparansi berpengaruh negatif
8.	Mufidah & Masnun, (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.	Independen : Pengendalian internal dan kompetensi  Dependen : Pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa	1. Pengendalian internal berengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa  4. Kompetensi tidak berengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
9.	Adhivinna dkk, (2022)	Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud	Independen : Kompetensi	1. kompetensi aparatur tidak berpengaruh
.		Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi pada Pemerintahan Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo).	aparatur dan sistem pengendalian intern  Dependen : Pencegahan fraud dana desa	1. terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.  2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
10.	Dewi dkk. (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap pencegahan	Independen : Kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi,	1. kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten)	praktik akuntabilitas dan whistleblowing  Independen :  Pencegahan fraud pengelolaan dana desa	Terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.  2. budaya organisasi dan whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
11.	Puspita & Ratnadi (2023)	Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (studi pada 23 desa di Kabupaten Gianyar, Bali).	Independen  Kompetensi, pengendalian internal, low of control  Independen :  Pencegahan fraud pengelolaan dana desa	Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan Internal locus of control mempunyai pengaruh positif pada pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan dari hasil penelitian yang bersifat sementara. Sehingga perlu pembuktian kebenarannya. Seorang peneliti harus mengumpulkan data-data untuk dapat membuktikan dugaan sementara itu apakah benar. Hipotesis penelitian bisa diterima tetapi juga bisa ditolak, hal itu tergantung kepada data empiris. Hipotesis diterima jika cocok dengan data empiris, namun sebaliknya hipotesis akan di tolak apabila tidak cocok dengan data empiris. Hipotesis yang akan dikemukakan dalam penelitian ini akan menguji kebenaran data dari dugaan hubungan antara variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan sistem

pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu pencegahan fraud pengelolaan dana desa serta menguji pengaruh variabel moderasi yaitu *whistleblowing*.

Teori dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu *Agency Theory*, *Theory of Communicative Action* dan *Prosocial behavior*. Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan teori mengenai perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini kepala desa maupun perangkatnya bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai principal.

Tindakan komunikatif yang dimaksud yaitu tindakan yang mengarahkan setiap tindakan menjadi tindakan yang rasional dan berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Orang yang berniat baik melaporkan segala bentuk kecurangan merupakan pengertian dari *prosocial behavior* sehingga teori ini dijadikan dasar pengujian hipotesis Whistleblowing.

#### **2.6.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Dalam penelitian ini penulis akan menguji pengaruh kompetensi terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kecurangan bisa saja terjadi meskipun orang tersebut memiliki wewenang tinggi di perusahaan tetapi kompetensi yang dimilikinya tidak memenuhi (Adhivinna dkk, 2022).

Salah satu yang menjadi faktor kunci dari teori keagenan yakni preferensi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen yang berbeda-beda tujuan. Hal tersebut sering kali memunculkan konflik dalam hubungan keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu dalam hubungannya akan bertindak sesuai dengan tujuan masing-masing, sehingga kurangnya pengawasan dan pengendalian yang kurang baik mampu meningkatkan resiko timbulnya fraud (Puspita & Ratnadi, 2023).

Semakin seseorang memiliki kewenangan/jabatan yang tinggi di dalam organisasi, tetapi kompetensi yang dimiliki tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecurangan (fraud). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Islamiyah (2020) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kompetensi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2022) dan penelitian Puspita & Ratnadi (2023).

Berdasarkan bukti penelitian sebelumnya dengan adanya pengaruh yang positif antara kompetensi terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa maka hipotesis pertama dari penelitian ini direncanakan untuk menguji pengaruh positif antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

***(H1) : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa***

## **2.6.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Manajemen yang mempengaruhi penerapan proses untuk meyakinkan dalam pencapaian daya guna, ketepatan, patuh pada tata tertib dan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan penyajian laporan keuangan yang dapat dibuktikan keandalannya merupakan arti dari sistem pengendalian internal.

Ada dua pendekatan sistem pengendalian didalam organisasi (Bastian : 2002) yaitu: a) Pendekatan dari sudut pengolahan transaksi organisasi. Pengolahan transaksi bersumber dari data yang diproses untuk menghasilkan informasi. Pendekatan ini berhubungan dengan kegiatan pengendalian akuntansi berupa pengendalian yang berhubungan dengan transaksi atau aplikasinya dan pengendalian yang bersifat umum. b) Pendekatan dari sudut aspek manajerial dan pengambilan keputusan. Aspek manajerial dan pengambilan keputusan hendaknya didukung oleh sistem informasi yang akan menciptakan sistem pengendalian. Sistem informasi ini disebut sistem pengendalian manajemen yang meliputi kegiatan membandingkan realisasi dengan kriteria perencanaan sebagai landasan pengambil tindakan koreksi.

Hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dilakukan oleh Sari dkk (2019), Kusumastuti dkk (2020), Islamiyah dkk (2020), Mufidah & Masnun (2021), Adhivinna dkk, (2022), Puspita & Ratnadi (2023). Berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penelitian sebelumnya yang menemukan dampak positif inklusi keuangan terhadap kinerja maka rencana dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

**(H2) : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa**

### **2.6.3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Whistleblowing.**

Selain menguji hipotesis pengaruh langsung kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa maka pengujian hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah menguji dampak tidak langsung hubungan variabel kompetensi aparatur desa karena dimoderasi oleh variabel Whistleblowing (*whistleblowing*). Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan, Whistleblowing merupakan suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepada bagian anggaran), yang di mana whistleblowing diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban (Bayan dkk, 2020)

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa whistleblowing mampu memoderasi hubungan antara pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dilakukan oleh Bayan dkk (2020). Dengan adanya bukti hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini direncanakan untuk menguji pengaruh positif antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan variabel moderasi *whistleblowing*.

**(H3) : *Whistleblowing memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa***

#### **2.6.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Whistleblowing.**

Selain menguji hipotesis pengaruh langsung kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa maka pengujian hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah menguji dampak tidak langsung hubungan variabel sistem pengendalian internal karena dimoderasi oleh variabel Whistleblowing (*whistleblowing*).

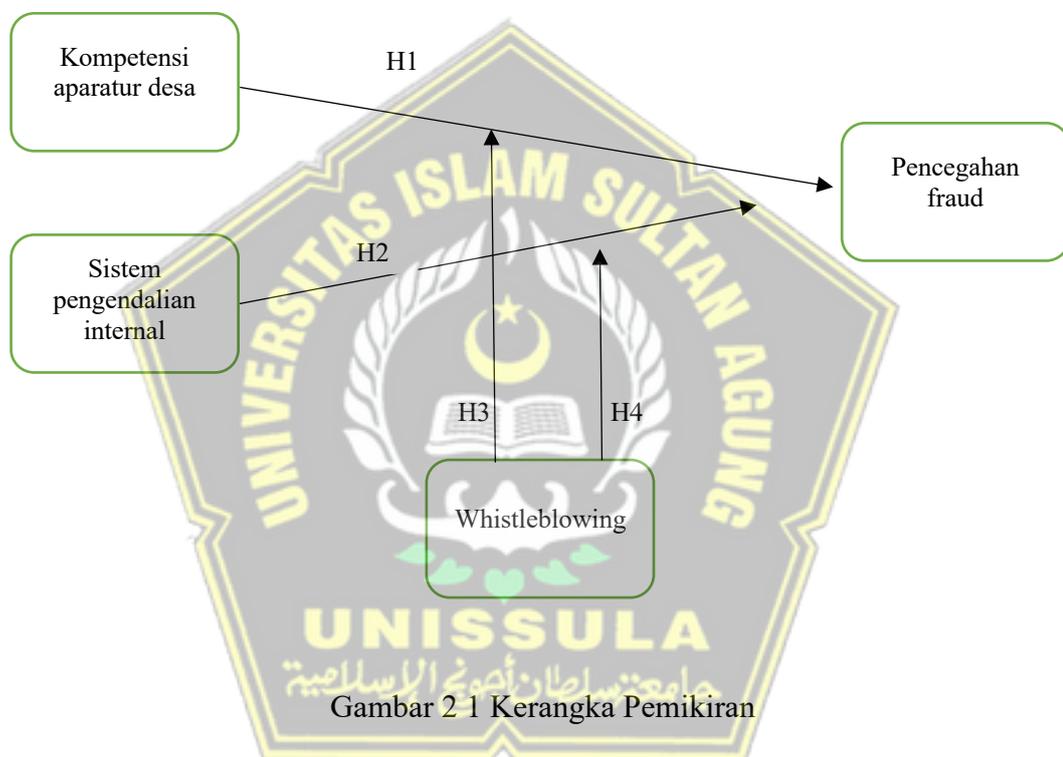
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Penelitian oleh (Bayan dkk, 2020) menunjukkan bahwa Whistleblowing mampu memoderasi hubungan antara pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah maka penelitian ini direncanakan untuk menguji pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan variabel moderasi *whistleblowing*.

**(H4) : *Whistleblowing memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa***

#### **2.7. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan rancangan ide dan atau gagasan penelitian. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel

yang dibagi menjadi dua variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal, satu variabel moderasi yaitu whistleblowing dan satu variabel dependen yaitu pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Pada kerangka pemikiran ini ditunjukkan bagaimana pengaruh antar variabel yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode *explanatory research* yaitu menekankan hubungan antara variabel-variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) dan pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) untuk menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian ekplanatori (*explanatory research*) menurut Husein Umar (2007:66) yaitu penelitian yang membuktikan adanya hubungan sebab akibat dan hubungan yang mempengaruhi atau di pengaruhi dari dua atau lebih variabel yang diteliti. Menurut Singarimbun & Effendi (1995:5) penelitian explanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sedangkan menurut (Sani & Vivin, 2013;180) penelitian explanatory (*explanatory research*) adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang akan di uji kebenarannya. Hipotesis itu menggambarkan hubungan antara dua variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau apakah variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya menurut Faisal dalam Sani dan Vivin (2013). Variabel yag akan di uji

dalam penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, whistleblowing dan pencegahan *fraud*.

### 3.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa yang mendapat alokasi dana desa di wilayah Kabupaten Boyolali sebanyak 267 desa yang tersebar di dua puluh dua Kecamatan. Sampel dalam penelitian ini adalah desa-desa yang termasuk kedalam wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali yang mewakili pembagian wilayah. Wilayah Barat diambil desa dari Kecamatan Selo dan Musuk, wilayah selatan desa dari kecamatan Sawit dan Teras, Wilayah Timur desa dari Kecamatan Ngemplak dan Nogosari, Wilayah Utara desa dari Kecamatan Juwangi dan Wonosegoro serta wilayah tengah diambil dari desa di Kecamatan Sambi dan Ampel.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu mengambil sampel secara tidak acak dari populasi yang telah ditentukan. Purposive sampling menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Kriteria desa yang dijadikan sampel adalah desa yang mendapat alokasi dana desa di atas 1 milyar, desa yang tidak ada kecurangan dalam pengelolaan dana desa periode tahun 2019 sampai 2022. Jumlah sampel menurut Hair dkk (2010), besarnya sampel bila terlalu besar akan menyulitkan untuk mendapat model yang

cocok, dan disarankan ukuran sampel yang sesuai antara 100-200 responden agar dapat digunakan estimasi interpretasi dengan Structural Equation Model (SEM).

### **3.3. Sumber Dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer. Menurut Willy & Jogiyanto (2015) mengemukakan data primer merupakan data mentah atau data yang belum diolah oleh siapapun untuk kepentingan tertentu. Data primer menunjukkan informasi yang masih asli yang ada dalam data tersebut. Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data ini digunakan metode kuisisioner. Dalam rangka untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian, data diperoleh dari penyebaran angket kepada responden dimana pernyataan terlebih dahulu disediakan oleh peneliti untuk mendukung data-data informasi melalui angket. Kuisisioner yang akan digunakan dan disajikan kepada responden terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a) Bagian yang mengungkapkan karakteristik responden. Berisi mengenai data karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan jabatan.

- b) Bagian yang mengungkapkan pertanyaan tentang variabel penelitian yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, whistleblowing dan pencegahan *fraud*.

### 3.5. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik dalam suatu penelitian. Variabel Bebas (*independent variable*) menurut Sugiyono (2015:61) sering disebut variabel stimulus, *predictor & antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempunyai pengaruh atau menyebabkan perubahan variabel terikat (*dependen*). Dalam penelitian ini variabel bebas penulis beri symbol x adalah kompetensi aparatur desa (X1) dan sistem pengendalian internal (X2).

Sugiyono (2015:61) mengemukakan bahwa variabel terikat (*dependent variable*) yang biasa disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang penulis beri simbol Z yaitu pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017:221). Variabel moderasi dalam penelitian ini yang diduga memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen yaitu whistleblowing (*whistleblowing*) dengan simbol Y.

Menurut Sharma, Durand, dan Oded (1981) Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis.

1. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*) Pure moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.
2. Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*) Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen di mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen.
3. Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*) Homologiser moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.
4. Variabel Prediktor Moderasi (*Predictor Moderator*) Predictor moderator merupakan variabel moderasi yang hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk.

Operasionalisasi variabel adalah memecah variabel-variabel yang terkandung dalam masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga dapat diketahui klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Definisi variabel penelitian

dalam penelitian ini yaitu kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Indikator sebagai pengukuran variabel kompetensi aparatur perangkat desa (X1) yaitu

1. Aparatur perangkat desa harus mengerti tentang peraturan pengelolaan dana desa.
2. Aparatur perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa.
3. Aparatur perangkat desa mampu mengelola dana desa dengan baik.
4. Aparatur perangkat desa mampu mengalokasikan dana desa sesuai kebutuhan.
5. Aparatur perangkat desa jujur dalam mengelola dana desa.
6. Aparatur perangkat desa bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.
7. Aparatur desa dalam mengelola dana desa berdasarkan prinsip kehati-hatian.
8. Aparatur desa teliti dalam mengelola dana desa.

Definisi variabel X2 sistem pengendalian internal adalah merupakan proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel ini ada lima yaitu :

1. Struktur organisasi berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.
2. Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan diberikan untuk meningkatkan kompetensi agar terhindar dari segala bentuk resiko yang mungkin terjadi.

3. Pemeriksaan dilakukan dengan independen atas kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa.
4. Informasi yang disajikan dibuat dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dikomunikasikan dengan pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat.
5. Pemantuan maupun pengawasan dilakukan secara periodik agar dapat meminimalisir tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

*Whistleblowing* adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Indikator variabel *whistleblowing* (X3) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen aparatur desa untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran.
2. Pemerintah desa berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran.
3. Struktur organisasi berkomitmen membuat unit pengelolaan *whistleblowing system*.
4. Sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan *whistleblowing system*.
5. Mekanisme dan prosedur kerja *whistleblowing system* mudah.
6. *Whistleblowing* efektif dan berkelanjutan.

Pencegahan *fraud* adalah aktivitas yang dilakukan manajemen dalam mempersempit praktek kecurangan dengan biaya murah serta di dukung oleh seluruh pelaku organisasi. Indikator yang digunakan dalam variabel pencegahan *fraud* (Y) adalah :

1. Struktur organisasi akan memberi sanksi tegas terhadap segala bentuk kecurangan.
2. Masyarakat selalu dilibatkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa.
3. Pemerintah desa selalu terbuka dan menerima masukan, saran dan kritikan dari masyarakat mengenai pengawasan program dana desa baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan.
4. Semua aparatur desa selalu diberi kesempatan dalam mengajukan sebuah kritikan maupun saran saat pemecahan masalah terkait pengelolaan dana desa.
5. Setiap dana desa yang diterima dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
6. Pemerintah desa membuat laporan pelaksanaan program keseluruhan pada akhir periode saat menerima dana desa.

Untuk memberikan pengertian dan penafsiran terhadap variabel penelitian maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 3 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi konsep	Indikator	Sumber
1.	Kompetensi aparatur desa (X1)	Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut	1. Pengetahuan/pemahaman 2. Ketrampilan/kemampuan 3. Sikap	Kholifah (2020)

2.	Sistem pengendalian internal (X2)	Merupakan proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan	1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian resiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian internal	Resmiani (2020)
No	Variabel	Definisi konsep	Indikator	Sumber
		yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku		
3.	Whistleblowing (Y)	Pengungkapan yang dilakukan atas aktivitas/sikap yang melanggar atau melawan hukum, sikap yang tidak patut/tidak bermartabat atau sikap lain yang dapat merugikan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran yang terjadi.	1) Aspek struktural 2) Aspek operasional 3) Aspek perawatan	Anandya (2020)
4.	Pencegahan fraud (Z)	Penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu.	1) Penetapan kebijakan 2) Prosedur pencegahan 3) Organisasi 4) Teknik pengendalian	Resmiani (2020)

Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert sebagai alat penelitian untuk mengukur pernyataan, pendapat, persepsi yang tercantum pada kuesioner. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel adalah menggunakan kuisisioner. Kuisisioner ini berisi item-item pertanyaan sebagai

penjabaran dari indikator-indikator variabel. Untuk mengubah data dari variabel-variabel yang ada kedalam perhitungan data, maka penulis menggunakan skala likert yang sering digunakan pada penelitian sosial.

Pada skala Likert ini responden menjawab pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X) atau tanda centang (√) pada alternatif jawaban dengan lima kemungkinan yang tersedia. Dalam hal ini penulis akan memberikan pertanyaan dengan lima alternatif jawaban yang harus dipilih salah satu jawaban saja. Untuk mempermudah penilaian jawaban, penulis akan memberikan nilai dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yaitu nilai lima untuk jawaban yang positif dan nilai satu untuk jawaban yang sangat negatif. Maka bentuk penilaiannya sebagai berikut.

1. Nilai 5 jawaban SS (sangat setuju)
2. Nilai 4 jawaban S (setuju)
3. Nilai 3 jawaban N (netral)
4. Nilai 2 jawaban TS (tidak setuju)
5. Nilai 1 jawaban STS (sangat tidak setuju)

### **3.7. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya. Contoh proses pengolahan data seperti mengelompokkan data berdasarkan jenis responden, membuat tabulasi dan melakukan perhitungan uji hipotesis.. Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 2.6

### 3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019 : 206). Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

### 3.7.2. Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah alat ukur itu mengukur apa yang akan diukur, maka perlu dites skor item dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor item dengan menggunakan rumus *multi variate correlation*.

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka tabel korelasi  $r$ , apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir soal dikatakan valid. Sedangkan apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir soal dikatakan tidak valid. Peneliti menggunakan aplikasi pengolah data SPSS versi 2.6 untuk membantu dalam mengolah data.

### 3.7.3. Uji Realibilitas Data

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran data dapat memberikan hasil relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran pada subjek yang sama atau dengan kata lain untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara sesuatu

yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Untuk menguji keadaan (reliabilitas) instrument digunakan rumus Alpha. Suatu pernyataan dikatakan reliabel jika  $r > 0,6$  dan jika  $r < 0,6$  maka pernyataan tersebut tidak reliabel. (Ghozali : 2016).

### **3.7.4. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.7.4.1. Uji Normalis Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dasar pengambilan keputusan jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

#### **3.7.4.2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara uji Glejser. Uji Glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual.

Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.7.4.3. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Dimana dalam multi regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. (Ghozali dalam Siswanto 2018).

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dijelaskan untuk variabel bebas lainnya. Nilai dasar yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan  $VIF < 10$  (Ghozali dalam Siswanto 2018).

#### 3.8. Analisis Regresi Linier Berganda dari MRA

Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk mengetahui hubungan antara kompetensi aparatur perangkat desa, sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa dengan whistleblowing sebagai variabel pemoderasi. *Moderated Regression Analysis (MRA)* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi

(perkalian dua atau lebih variabel independen). Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Dengan melakukan pengujian ini nilai-nilai statistik setiap variabel bebas.

Salah satu cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating yaitu dengan menggunakan uji interaksi. Uji Interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua/lebih variabel independen). *Moderated Regression Analysis* menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya.

*Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan analisis khusus regresi berganda linier dimana persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Pada penelitian ini, interaksi yang terjadi adalah perkalian antara whistleblowing dengan kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Pengolahan analisis regresi moderasi dilakukan dengan membandingkan persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator sebagai berikut :

$$Z = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_1y + b_4x_2y + x_1z + x_2z + e$$

Keterangan :

- z : Pencegahan fraud dengan model MRA  
 x1 : Kompetensi aparatur desa

- x2 : Sistem pengendalian internal  
 y : Whistleblowing (variabel moderasi)  
 x1y : Interaksi antara variabel kompetensi aparatur desa dengan *whistleblowing*  
 x2y : Interaksi antara variabel sistem pengendalian internal dengan *whistleblowing*  
 x1z : Interaksi antara variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dengan moderasi *whistleblowing*  
 x2z : Interaksi antara variabel sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan moderasi *whistleblowing*  
 a : Konstanta  
 b : Koefisien regresi  
 e : Tingkat kesalahan

### 3.9. Uji Goodness Of Fit

#### 3.9.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama. Pengujian hipotesis dengan menggunakan distribusi F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Basuki dan Prawoto, (2016:87). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti ( $\alpha = 0,05$ ).

Apabila nilai F hitung  $\geq$  dari nilai F tabel maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama sehingga dapat diterima Dengan  $\alpha = 5\%$ , kriteria pengujian dengan Uji F adalah:

- a. Jika nilai probabilitas  $\text{prob} \leq 0,05$  = berarti ada pengaruh secara simultan variabel independent terhadap variabel dependent, berarti model dapat digunakan.
- b. Jika nilai probabilitas  $\text{prob} \geq 0,05$  = berarti tidak berpengaruh tidak ada pengaruh secara simultan variabel independent terhadap variabel dependent.

### 3.9.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ini mengukur berapa sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Penelitian ini menggunakan adjusted  $R^2$  karena variabel dependent yang digunakan dalam model penelitian lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.

Menurut Eksandy dan Heriyanto (2017:34), hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nilai R-Squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan Jika nilai R-Squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat (Y) 100% dipengaruhi oleh variabel bebas (X) dan Jika R-Squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.9.3. Uji Hipotesis dengan uji t

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016) adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi uji t  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- 2) Jika nilai signifikansi uji t  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh desa di kabupaten Boyolali, sejumlah 267 desa, Teknik pengamilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan total 125 desa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, 125 desa tersebut menyebar di sepuluh (10) Kecamatan yaitu Selo, Musuk, Teras, Sawit, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Juwangi, Wonosegoro.

Tabel 4.1 Deskripsi sampel

No	Kecamatan	Jumlah responden (desa)
1	Selo	11
2	Cepogo	15
3	Teras	13
4	Sawit	12
5	Sambu	16
6	Ngemplak	12
7	Nogosari	13
8	Simo	13
9	Juwangi	10
10	Wonosegoro	10
	Total	125

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan data tabel 4.1 tersebut dapat diketahui jumlah responden masing-masing Kabupaten/Kota yang mengisi kuesioner sebagai dasar pengolahan data penelitian. Jumlah responden Kecamatan Selo 11 desa, Kecamatan Cepogo 15

desa, Kecamatan Teras 13 desa, Kecamatan Sawit 12 desa, Kecamatan Sambi 16 desa, Kecamatan Ngemplak 12 desa, Kecamatan Nogosari 13 desa, Kecamatan Simo 13 desa, Kecamatan Juwangi 10 desa dan Kecamatan Wonosegoro 10 desa.

Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Juni 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan cara online melalui google form sehingga terkumpul data kuesioner sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) desa untuk dijadikan dasar olah data penelitian.

## 4.2. Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian berikut, peneliti akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari responden. Data deskriptif memberikan gambaran mengenai keadaan atau kondisi responden yang perlu diperhatikan.

#### 4.2.1.1. Karakteristik Deskriptif Responden

Berdasarkan data yang masuk dapat diketahui demografi responden sebagai acuan dalam melihat karakteristik responden dibuat deskripsi data sebagai berikut:

Tabel 4 2 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Jenis Kelamin	Laki – laki	104	83
	Perempuan	21	17
Jabatan	Kepala desa	21	17
	Sekretaris desa	36	29
	Perangkat desa	68	54
Usia	21 – 30 tahun	0	0
	31 – 40 tahun	57	46
	41 – 50 tahun	33	26
	51 – 60 tahun	25	20
	61 tahun keatas	10	14
Pendidikan	SLTP/ sederajat	0	0
	SLTA/ sederajat	52	42
	Diploma	24	19
	Sarjana	49	39

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan, usia dan pendidikan. Jenis kelamin perangkat pemerintahan desa lebih banyak laki-laki karena berdasarkan jumlah responden dari. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan.

Rata-rata usia responden mayoritas usia antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun, hal ini menunjukkan bahwa usia produktif perangkat pemerintahan desa di Boyolali berusia di atas 30 tahun. Sedangkan dari segi pendidikan mayoritas responden adalah SLTA/ sederajat, disusul sarjana dan Diploma 3. Walaupun kebanyakan berlatar belakang Pendidikan setingkat SLTA, namun dari sisi pengetahuan, perangkat desa, sudah banyak memahami tentang tata Kelola yang dana desa yang baik sebagaimana regulasi yang ada, pun demikian juga di sisi pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa di kabupaten boyolali mematuhi arahan dari supervisornya (dispermades) kabupaten boyolali.

#### 4.2.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam pengumpulan dan penyajian data agar mudah unuk dipahami, data di jabarkan dengan menggunakan analisis deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah *Kompetensi aparatur perangkat desa, Pengendalian Intern, whistleblowing* dan *pencegahan fraud*. Pengukuran pada variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor terendah 1 (Sangat Tidak Setuju) dan skor tertinggi adalah 5 (Sangat Setuju).

Untuk mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat diketahui dengan perkalian antara skor tertinggi dalam setiap variabel dengan jumlah item pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dalam 5 kategori, adalah sebagai berikut :

$$RS = (m-n) / k \quad RS = (5-1) / 4 = 1$$

Dimana :      RS      : rentang skala                      n      : skor minimal  
                   m      : skor maksimal                      k      : jumlah variabel

Berdasarkan data diatas kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

0,00 - 1,00	:	Sangat rendah atau sangat tidak baik yang menunjukkan kondisi variabel yang masih sangat rendah atau sangat kecil
1,00 – 2,00	:	Rendah atau tidak baik yang menunjukkan kondisi variabel yang masih rendah atau kecil.
2,00 – 3,00	:	Sedang atau cukup yang menunjukkan kondisi variabel yang sedang atau cukup
3,00 – 4,00	:	Tinggi atau baik yang menunjukkan kondisi variabel yang tinggi atau baik
4,00 – 5,00	:	Sangat tinggi atau sangat baik yang menunjukkan kondisi variabel yang sangat tinggi atau sangat baik

### 1) Kompetensi Aparatur Perangkat Desa

Terdapat delapan pertanyaan variabel Kompetensi aparatur perangkat desa.

Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jawaban Responden Variabel Kompetensi aparatur perangkat desa

Indikator Variabel	Deskripsi										N	Total	Rata-rata
	STS		TS		N		S		SS				
	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS			
X1.1	0	0	8	16	9	27	37	148	81	405	125	596	4,77
X1.2	0	0	10	20	8	24	55	220	62	310	125	574	4,60
X1.3	0	0	10	20	10	30	51	204	64	320	125	574	4,60
X1.4	0	0	11	22	12	36	45	180	67	335	125	573	4,59
X1.5	0	0	6	12	8	24	43	172	78	390	125	598	4,78
X1.6	3	3	6	12	16	48	41	164	69	345	125	570	4,56
X1.7	5	5	6	12	6	18	38	152	80	400	125	597	4,78
X1.8	0	0	8	16	8	24	48	192	71	355	125	587	4,70
Rata – rata total													4,67

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel kompetensi aparatur perangkat desa (X1) dengan total skor rata-rata jawaban sebesar 4,67, skore ini berada dalam kategori “sangat tinggi”, artinya kompetensi aparatur desa di kabupaten boyolali dipersepsikan oleh responden sudah sangat baik. Secara lebih detail dari tabel diatas dapat dibaca bahwa indikator Pernyataan tentang keharusan aparatur desa mengerti tentang peraturan pengelolaan dana desa sebesar 4.77, kategorinya sangat tinggi, indikator aparatur desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa sebesar 4.60, juga termasuk kategori sangat tinggi, indikator aparatur desa mampu mengelolala dana desa dengan baik sebesar 4.60, ini juga sangat tinggi, indikator aparatur desa mampu mengelolala dana desa dengan baik sebesar 4.59, indikator aparatur desa jujur dalam mengelola dana desa sebesar 4.78, indikator aparatur desa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa sebesar 4.56, indikator aparatur desa dalam mengelola dana desa berdsarkan prinsip kehati hatian sebesar 4.78, indikator aparatur desa teliti

dalam mengelola dana desa sebesar 4.7. walaupun dalam variabel kompetensi apratur desa indikatornya sangat baik, peningkatan kapasitas perangkat desa harus tetap selalu terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

## 2) Sistem Pengendalian Intern

Terdapat lima pertanyaan variabel sistem pengendalian internal. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jawaban Responden Variabel Sistem pengendalian internal

Indikator Variabel	Deskripsi										N	Total	Rata-rata
	STS		TS		N		S		SS				
	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS			
X2.1	5	5	8	16	8	24	54	216	60	300	125	561	4,49
X2.2	0	0	8	16	4	12	57	228	66	330	125	586	4,69
X2.3	0	0	6	12	14	42	68	272	47	235	125	561	4,49
X2.4	0	0	6	12	9	27	56	224	64	320	125	583	4,66
X2.5	0	0	6	12	6	18	58	232	65	325	125	587	4,70
Rata – rata total													4,60

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian internal (X2) dengan total skor rata-rata jawaban sebesar 4,60 yang berada dalam kategori “sangat tinggi”. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan di desa-desa wilayah Kabupaten Boyolali menurut persepsi responden sudah sangat bagus. Dari 5 pernyataan yang diajukan, nilai indikator tertinggi pada pemantauan maupun pengawasan dilakukan secara periodik agar dapat meminimalisir Tindakan atau hal hal yang tidak diinginkan tentang sturtur organisasi. Ini menunjukkan bahwa pengawasan secara periodic telah dilakukan oleh supra desa, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

### 3) *Whistleblowing*

Terdapat enam pertanyaan variabel *whistleblowing*. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jawaban Responden Variabel *whistleblowing*

Indikator Variabel	Deskripsi										N	Total	Rata-rata
	STS		TS		N		S		SS				
	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS			
Z1	0	0	8	16	11	33	54	216	62	310	125	575	4,60
Z2	6	6	13	26	11	33	45	180	60	300	125	539	4,31
Z3	0	0	6	12	19	57	59	236	51	255	125	560	4,48
Z4	0	0	11	22	15	45	49	196	60	300	125	563	4,47
Z5	0	0	11	22	10	30	50	200	64	320	125	572	4,58
Z6	0	0	10	20	6	18	55	220	64	320	125	578	4,62
Rata – rata total													4,51

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel *whistleblowing* (Z) dengan total skor rata-rata jawaban sebesar 4,51 yang berada dalam kategori “sangat tinggi”. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem sistem pelaporan di desa-desa wilayah Kabupaten Boyolali sudah sangat bagus. Ini artinya bahwa aparatur desa di Kabupaten Boyolali, mempunyai komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemui, disamping juga melindungi setiap pelapor yang melaporkan pelanggaran.

Kemudian dari sisi skoring, indikator tentang *whistleblowing* berjalan efektif dan berkelanjutan mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu, 4.62, hal ini menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* di kabupaten Boyolali, sudah berjalan sangat baik.

#### 4) Pencegahan fraud

Terdapat enam pertanyaan variabel pencegahan fraud. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4 6 Jawaban Responden Variabel Pencegahan fraud

Indikator Variabel	Deskripsi										N	Total	Rata-rata
	STS		TS		N		S		SS				
	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS	F	FXS			
Y1	0	0	10	20	6	18	62	248	57	285	125	571	4,57
Y2	2	2	6	12	8	24	43	172	76	380	125	590	4,72
Y3	0	0	6	12	11	33	35	140	83	415	125	610	4,88
Y4	0	0	2	4	14	42	58	232	61	305	125	583	4,66
Y5	0	0	9	18	8	24	38	152	80	400	125	594	4,83
Y6	0	0	7	14	10	30	35	140	83	415	125	599	4,80
Rata – rata total													4,74

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel pencegahan fraud pengelolaan dana desa (Y) dengan total skor rata-rata jawaban sebesar 4,74 yang berada dalam kategori “sangat tinggi”. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa wilayah Kabupaten Boyolali sudah sangat bagus dan sulit terjadinya fraud.

Dari 6 variabel indikator, variabel yang ke tiga, yaitu pemerintah desa selalu terbuka dan menerima masukan, saran dan kritik dari masyarakat mengenai pengawasan program dana desa, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan, mendapatkan skoring tertinggi 4.88. ini menunjukkan bahwa, pertama ada sisib demokratis dari aparaturnya desa di kabupaten boyolali, karena siap menerima saran dan masukan. Kedua, keterlibatan pihak lain dalam memberikan saran sangat besar, misalnya peran pendamping desa dalam memberikan saran dan

arahan bagi aparat untuk merencanakan dan mengelola program yang berasal dari dana desa.

### 4.3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji setiap butir skor dimana skor yang dihasilkan dari kuisioner dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai  $x$  dan skor nilai total dipandang sebagai nilai  $y$ . Dengan diperoleh indeks validitas setiap butir dapat diketahui dengan pasti butir-butir yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya.

Keputusan mengenai validitasnya setiap butir pernyataan adalah dengan membandingkan antara nilai  $r$  hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan nilai  $r$  tabel. Ketentuannya sebagai berikut:

$r$  hitung  $<$   $r$  tabel, dinyatakan tidak *valid*

$r$  hitung  $>$   $r$  tabel, dinyatakan *valid*

Untuk mengetahui hasil dari perhitungan Uji Validitas, maka dapat diuraikan per variabel penelitian yaitu :

Tabel 4 7. Uji validitas data

Variabel	Indikator	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
Kompetensi Aparatur Perangkat Desa	Pertanyaan 1	0,819	Valid
	Pertanyaan 2	0,936	Valid
	Pertanyaan 3	0,949	Valid
	Pertanyaan 4	0,844	Valid
	Pertanyaan 5	0,892	Valid
	Pertanyaan 6	0,798	Valid
	Pertanyaan 7	0,860	Valid

	Pertanyaan 8	0,915	Valid
Sistem Pengendalian Internal	Pertanyaan 1	0,843	Valid
	Pertanyaan 2	0,904	Valid
	Pertanyaan 3	0,870	Valid
	Pertanyaan 4	0,937	Valid
	Pertanyaan 5	0,921	Valid
	Whistleblowing	Pertanyaan 1	0,876
Pertanyaan 2		0,661	Tidak Valid
Pertanyaan 3		0,839	Valid
Pertanyaan 4		0,864	Valid
Pertanyaan 5		0,860	Valid
Pertanyaan 6		0,894	Valid
Pencegahan Fraud	Pertanyaan 1	0,921	Valid
	Pertanyaan 2	0,757	Valid
	Pertanyaan 3	0,875	Valid
	Pertanyaan 4	0,849	Valid
	Pertanyaan 5	0,851	Valid
	Pertanyaan 6	0,848	Valid

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Dari hasil penelitian terhadap sejumlah 125 responden dengan 25 item pernyataan, ada satu pernyataan dinyatakan *tidak valid*. Diketahui bahwa r tabel sebesar 0.676 namun hasil r hitung pada pernyataan variabel x3.2 diperoleh hasil sebesar 0.661. Sedangkan untuk 24 item pernyataan yang lain diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dinyatakan *valid*. Data yang tidak valid dikeluarkan dan tidak ikut dalam pengolahan data penelitian.

#### 4.4. Uji Realibilitas Data

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha  $> 0,6$ . Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

Tabel 4 8. Uji Reabilitas Data

No	Instrumen	Koefisien Reliabilitas	Kategori
1	Kompetensi Aparatur Perangkat Desa	0,940	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Internal	0,931	Reliabel
3	<i>Whistleblowing</i>	0,932	Reliabel
4	Pencegahan Fraud	0,922	Reliabel

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel, hal tersebut ditunjukkan dari olah data diperoleh hasil semua di atas nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,6. Nilai *Cronbach Alpha* variabel x1 sebesar 0.940, variabel x2 sebesar 0.931, variabel x3 sebesar 0.932 dan variabel y sebesar 0.922.

#### 4.5. Uji Asumsi Publik

##### 4.5.1. Uji Normalis Data

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorof-Smirnov Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4 9. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,93342022
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,093
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		,079
Point Probability		,000

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai test Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.112 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.079, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data residualnya adalah berdistribusi normal.

#### 4.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,668	,793		4,625	,000
	x1	,069	,052	,280	1,339	,183
	x2	-,220	,088	-,522	-2,497	,114

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur perangkat desa diperoleh sebesar  $0,183 > 0,05$  dan variabel sistem pengendalian intern sebesar  $0,114 > 0,05$ . Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.5.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *Collinearity Statistics* Jika diperoleh nilai tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$ , data tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4 11. Uji Multikolinearitas Data

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur Perangkat Desa	0,158	6,336
Sistem Pengendalian Intern	0,111	8,991
<i>Whistleblowing</i>	0,134	7,486

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas, menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Nilai *tolerance* variabel x1 sebesar 0.158, x2 sebesar 0.111 dan x3 sebesar 0.134. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai VIF variabel x1 sebesar 6.336, variabel x2 sebesar 8.991 dan variabel x3 sebesar 7.486. Berdasarkan nilai tolerance dan nilai VIF variabel independen, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan pada uraian dan beberapa hasil uji tes di atas dapat disimpulkan ringkasan hasil uji asumsi klasik sebagai berikut :

Tabel 4 12. Ringkasan Uji Asumsi Publik

Variabel	Normalis	Multikolinieritas	Heteroskedastisitas
Kompetensi Aparatur Perangkat Desa	Data normal	Tidak terjadi multikolinieritas	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem pengendalian internal	Data normal	Tidak terjadi multikolinieritas	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<i>Whistleblowing</i>	Data normal	Tidak terjadi multikolinieritas	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pencegahan fraud	Data normal	Tidak terjadi multikolinieritas	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Rangkuman tabel di atas menunjukkan bahwa semua hasil uji asumsi klasik terpenuhi, sehingga penelitian ini layak untuk dibahas lebih lanjut.

#### 4.6. Analisis Regresi Linier Berganda dari MRA

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (Multiple regression analysis).

Tabel 4 13. Uji MRA

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	t	Sig.
Constant	14,707	1,773	8,926	,438
x1y	,969	,161	6,007	,000
x2y	,513	,132	3,892	,000
x1x3y	,032	,003	11,294	,000
x2x3y	,078	,111	,700	,485

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Tabel 4 14. Uji F

F tabel	F hitung	Sig	Keterangan
2.44	264.678	0.000	Berpengaruh Simultan

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Tabel 4 15. Uji Koofisien Determinasi

R Squared	Adjusted R Aquare	Std. Error of the Estimate
0.813	0.810	2.741

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_2 = 14,707 + 0,969x_1 + 0,513x_2 + 0,032x_1x_3y + 0,078x_1x_3y$$

Pengambilan keputusan :

- a) Interaksi  $x_1x_3y$  adalah 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 5\%$ ) maka hal ini berarti bahwa *whistleblowing* terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel kompetensi aparatur perangkat desa ( $x_1$ ) dengan pencegahan fraud pengelolaan dana desa ( $y$ )
- b) Interaksi  $x_2x_3y$  adalah 0,485 artinya lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} < 5\%$ ) maka hal ini berarti bahwa *whistleblowing* tidak terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel sistem pengendalian internal ( $x_2$ ) dengan pencegahan fraud pengelolaan dana desa ( $y$ )

#### 4.7. Uji Goodness Of Fit

##### 4.7.1. Uji F

Apabila nilai F hitung  $\geq$  dari nilai F tabel maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama sehingga dapat diterima Dengan  $\alpha = 5\%$ , kriteria pengujian dengan Uji F adalah: a. Jika nilai probabilitas  $\leq 0,05 =$  berarti ada pengaruh secara simultan variabel independent terhadap variabel dependent, berarti model dapat digunakan. Jika nilai probabilitas  $\geq 0,05 =$  berarti tidak ada pengaruh secara simultan variabel independent terhadap variabel dependent, berarti model dapat digunakan.

Dari tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa pada kolom Sig menunjukkan angka 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil daripada nilai tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  atau 5% dan perolehan F hitung 264.678 lebih besar dari F tabel yaitu 2.44, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

#### 4.7.2. Koefisien Determinasi (R Kuadrat)

Nilai determinasi yang mendekati satu berarti hubungan variabel tersebut semakin erat ( $0 < R^2 < 1$ ), sehingga secara umum didefinisikan uji ( $R^2$ ) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel terkait dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

Dari tabel 4.15 diatas dapat diartikan besarnya pengaruh variabel variasi produk dan kualitas produk serta *store atmosphere* terhadap minat pembelian ulang (*Adjusted R Square*) sebesar 0,810 atau 81.0% , hal ini berarti bahwa 81.0% variasi variabel pencegahan fraud pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian intern sedangkan sisanya sisanya sebesar 19,0% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4.7.3. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri antara variable independent terhadap variabel dependent. Jika

nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Tabel 4 16. Uji t

Model	t tabel	t hitung	sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur Perangkat Desa → Pencegahan Fraud	1.979	6.007	0,000	Hipotesis 1 Diterima
Sistem Pengendalian Internal → Pencegahan Fraud	1.979	3.892	0,000	Hipotesis 2 Diterima
Kompetensi Aparatur Perangkat Desa → Whistleblowing(moderasi) → Pencegahan Fraud	1.979	11.294	0,000	Hipotesis 3 Diterima
Sistem Pengendalian Internal → Whistleblowing(moderasi) → Pencegahan Fraud	1.979	0.700	0,485	Hipotesis 4 Ditolak

Sumber data : data primer yang diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi aparatur desa nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$  atau 5 % dan nilai t hitung 6.007 lebih besar dari t tabel yaitu 1,979 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud.

Variabel sistem pengendalian intern nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$  atau 5 % dan nilai t hitung 3.892 lebih besar dari t tabel yaitu 1,979 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud.

Variabel moderasi *whistleblowing* hubungan antara variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$  atau 5 % dan nilai t hitung 11.294 lebih besar dari t tabel yaitu 1,979

sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa variabel whistleblowing memoderasi pengaruh hubungan antara variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud.

Variabel moderasi *whistleblowing* variabel sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud nilai signifikan 0,485 lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$  atau 5 % dan nilai t hitung 0.700 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,979 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa variabel whistleblowing tidak memoderasi pengaruh hubungan antara variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud.

#### 4.8. Pembahasan

##### 4.8.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis pertama ( $H_1$ ) adalah menguji pengaruh langsung antara variabel kompetensi aparatur perangkat desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa sebagai variabel eksogen terhadap variabel endogen kesatu yaitu Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. Dari uji signifikansi diperoleh nilai t-statistik sebesar  $6.007 > t$  tabel 1.979 dengan nilai p-values sebesar  $0.000 < 0.050$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa ada pengaruh langsung positif yang signifikan antara hubungan kompetensi aparatur perangkat desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya tingkat kompetensi aparatur desa, maka pencegahan fraud dana desa juga semakin baik. Aparatur desa diebut kompeten paling tidak memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: *pertama*, memiliki tentang regulasi pengelolaan dana desa, yaitu, Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, Peraturan Menteri Desa No.21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Peraturan Menteri keuangan (PMK) no. 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa, dan juga peraturan Menteri desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.

Kedua, pemerintah desa dalam hal ini aparatur desa, mampu mengelola dana desa sesuai dengan tingkat kebutuhan pembangunan di desa. Proses usulan penganggaran kegiatan didasarkan atas kebutuhan desa, baik melalui proses menyerap aspirasi melalui forum forum warga, musyawarah desa dan musyawarah dusun, atau melalui hasil analisis data dari pendataan yang dilakukan oleh desa, seperti hasil analisis dari data Indeks Desa Membangun (IDM), atau analisis dari SDGs yang kemudian akan memunculkan rekomendasi pembangunan desa, agar desa tersebut menjadi desa yang lebih maju atau desa yang bertahap menuju target target SDGs desa. harapannya kemudian secara bertahap, cita cita undang undang desa untuk mewujudkan desa yang bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan akan tercapai.

Ketiga, sikap. Sikap aparatur desa dapat dikatakan kompeten, jika dalam pengelolaan dana desa selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Wujud kejujuran dan bertanggungjawab ini dibuktikan dengan, *pertama*, proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai regulasi yang ditentukan, baik melalui proses swakelola atau memakai pihak ketiga. *Kedua*, dalam pelaksanaan kegiatannya, dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi standar Rencana anggaran biaya kegiatan. *Ketiga*, setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan,

kemudian segera membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan secara transparan dan akuntabel.

Dengan tingkat kompetensi aparatur sebagaimana yang dijelaskan di atas, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (fraud).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai referensi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh oleh Islamiyah (2020) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kompetensi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Wajak. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2022) studi empiris pada desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dan penelitian pada 23 desa di Kabupaten Gianyar Bali yang dilakukan oleh Puspita & Ratnadi (2023).

#### **4.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis kedua (H2) adalah menguji pengaruh langsung antara variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel eksogen terhadap variabel endogen yaitu pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Dari uji signifikansi diperoleh nilai t-statistik sebesar  $3.892 > t$  tabel 1.979 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.050$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa ada pengaruh langsung positif yang signifikan antara hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Artinya bahwa Ketika

sistem pengendalian intern semakin baik, maka pencegahan fraud pengelola dana desa juga akan semakin baik.

Dalam sistem pengawasan intern pemerintah no.60 tahun 2008, bahwa SPIP memiliki 6 unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilai resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Dalam konteks lingkungan pengendalian, desa desa di kabupaten boyoli sudah menerapaak pembagian tugas dan wewenang masing masing aparatur. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dibentuk secara khusus oleh kepala sebagai tim pelaksana kegiatan, artinya dalam konteks pelaksanaan kegiatan, kepala desa selaku kuasa pemegang anggaran, mendelegasikan kewenangannya kepada Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.yang harus melaporkan kegiatannya kepada kepala desa. Demikian pula dalam pelaksanaan kegiatannya, pemdes dalam hal ini kades, akan senantiasa memantau kinerja Tim pelaksana kegiatan, agar kegiatan terlaksana tepat waktu. Secara berkala kepala desa melakukan rapat atau evaluasi dengan perangkat desa untuk mengetahui sampai dimana program dan kegiatan telah dilaksanakan sehingga diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan.

Kemudian secara berrkala pendamping desa maupun supra desa ikut mengawasi proses pelaksanaan pembaguan di desa, agar sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai referensi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Islamiyah (2020) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh

positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Wajak. Penelitian pada 23 desa di Kabupaten Gianyar Bali yang dilakukan oleh Puspita & Ratnadi (2023).

Hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Kusumastuti dkk (2020), penelitian di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Mufidah & Masnun (2021), Penelitian dilakukan pada 8 Pemerintahan Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo oleh Adhivinna dkk, (2022), Penelitian di Kecamatan Lima puluh Kota oleh Sari dkk (2019).

#### **4.8.3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi *Whistleblowing*.**

Hasil uji hipotesis ketiga (H3) adalah menguji moderasi whistleblowing antara pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Dari uji signifikansi diperoleh nilai t-statistik sebesar  $11.894 > t$  tabel  $1.979$  dengan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Sehingga variabel whistleblowing menguatkan pengaruh hubungan antara kompetensi aparatur perangkat desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa whistleblowing yang dijalankan dengan baik mampu mendukung kompetensi sumber daya manusia aparatur perangkat desa. Komitmen aparatur desa untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Pemerintah desa berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran. Struktur organisasi berkomitmen membuat unit pengelolaan whistleblowing

system. Sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan whistleblowing system. Mekanisme dan prosedur kerja whistleblowing system mudah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi dalam penelitian ini yang dilakukan di SKPD Kabupaten Pulau Morotai oleh Bayan dkk (2020).

#### **4.8.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi *Whistleblowing*.**

Hasil uji hipotesis ketiga (H4) adalah menguji moderasi whistleblowing antara pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Dari uji signifikansi diperoleh nilai t-statistik sebesar  $0.700 < t \text{ tabel } 1.979$  dengan nilai signifikansi  $0.485 > 0.05$ . Sehingga variabel whistleblowing tidak memoderasi pengaruh hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Efektivitas pengendalian internal dilakukan untuk menjaga agar aktivitas organisasi tetap mengarah kepada tujuan organisasi. Struktur organisasi berjalan dengan baik artinya perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi dalam penelitian ini yang dilakukan di SKPD Kabupaten Pulau Morotai oleh Bayan dkk (2020).

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

#### 5.1.1. Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah direncanakan sebelumnya dalam penelitian yaitu menguji pengaruh hubungan langsung antara variabel eksogen dengan variabel endogen dan menguji pengaruh tidak langsung dengan adanya variabel mediasi. Setelah dilakukan penelitian, olah data penelitian serta observasi lainnya maka dapat ditemukan hasil pengaruh antar variabel penelitian.

Adapun dari olah data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan smart PLS versi 4.0 maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Ada pengaruh signifikan dan positif antara variabel kompetensi aparatur perangkat desa ( $x_1$ ) terhadap variabel pencegahan fraud pengelolaan dana desa ( $y$ )
2. Ada pengaruh signifikan dan positif antara variabel sistem pengawasan internal ( $x_2$ ) terhadap variabel pencegahan fraud pengelolaan dana desa ( $y$ )
3. Variabel *whistleblowing* terbukti memoderasi hubungan antara variabel kompetensi aparatur perangkat desa ( $x_1$ ) terhadap variabel pencegahan fraud pengelolaan dana desa ( $y$ )
4. Variabel *whistleblowing* tidak terbukti memoderasi hubungan antara variabel sistem pengawasan internal ( $x_2$ ) terhadap variabel pencegahan fraud pengelolaan dana desa ( $y$ )

## 5.2. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat dikemukakan implikasi teoritis sebagai berikut :

- 1) Kompetensi aparatur perangkat desa dan sistem pengendalian internal yang baik terbukti mampu mencegah kecurangan pengelolaan dana desa
- 2) Whistleblowing dapat memperkuat hubungan kompetensi aparatur perangkat desa terhadap pencegahan fraud

Landasan teori penelitian yang menjelaskan kompetensi aparatur perangkat desa yaitu teori keagenan (*agency theory*). teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada pemerintah (agen) untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.

Pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai agents bagi masyarakat desa (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat.

Teori Tindakan Komunikatif (*The Theory of Communicative Action*) digunakan sebagai landasan dasar variabel *fraud* pengelolaan dana desa. Tindakan komunikatif yang dimaksud yaitu tindakan yang mengarahkan setiap tindakan menjadi tindakan yang rasional dan berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti sebagai teori pendukung untuk pengungkapan kecurangan.

*Prosocial behavior* menjadi teori yang mendukung intensi whistleblowing. Aparatur perangkat desa melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya

membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.

### **5.3. Implikasi Kebijakan**

Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia perangkat desa yang baik dan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada pemerintah desa yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pelatihan kapasitas perangkat desa perlu terus dilakukan agar aparatur desa menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya sesuai dengan pekerjaannya. Sistem pengendalian internal perlu dipertahankan guna mengontrol struktur organisasi dalam menjalankan tugas.

### **5.4. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha untuk merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

- 1) Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan karena penyebaran kuesioner dengan google form.

- 2) Variabel moderasi pada penelitian ini memakai *pure moderating*, sehingga *quasi moderating* yang menguji pengaruh langsung antara whistleblowing dengan pencegahan fraud belum dilakukan.
- 3) Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten boyolali, yang kepemimpinan di daerahnya cukup kuat, sehingga sangat mungkin ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan aparatur desa di Kabupaten Boyolali.

### 5.5. Agenda Penelitian Mendatang

Hasil-hasil penelitian ini dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sumber ide bagi pengembangan penelitian ini dimasa yang akan datang, maka perluasan penelitian yang disarankan dari penelitian ini adalah menambah variabel independent, misalnya variabel whistleblowing yang mempengaruhi pencegahan fraud dan variabel yang dapat memoderasi pengaruh hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Anandya, K. C. R. (2020). *Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Benoa Bali*.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Bayan, A., Hormati, A., & Djaelani, Y. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Whistleblowing sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, 8, 1–23.
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Kholifah, N. N. (2020). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Remba*. 1–281. <http://lib.unnes.ac.id/17468/1/7101409069.pdf> <http://lib.unnes.ac.id/43058/1/7101416005.pdf>
- Le, T. H., Chuc, A. T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: Empirical evidence from Asia. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 310–322. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.002>

- Made Resmiani. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*.
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p05>
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>

